KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU EBET Mulai Dibahas Komisi VII: Libatkan Kemenperin dan BRIN
Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

RUU EBET Mulai Dibahas

Komisi VII: Libatkan Kemenperin Dan BRIN

Senayan tengah membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta ikut membahas RUU ini karena akan melibatkan industri hingga riset dan inovasi.

ANGGOTA Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, wakil Pemerintah yang terlibat dalam pembahasan RUU EBET ini tidak termasuk Kemenperin. Diharapkan, ada revisi Surat Presiden untuk penambahan wakil pemerintah dengan melibatkan Kemenperin.

"Membaca Surpres (Surat Presiden ke DPR) 25 Agustus, mungkin ada perbaikan surat dengan menambahkan Kemenperin sebagai wakil Pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden. Agar, Kemenperin ikut membahas RUU ini," kata Andi di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia bilang, RUU ini nantinya akan memperkuat industri dalam negeri melalui jumlah kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengaturan harga jual EBET, izin tarif dan harga patokan tertinggi. Salah satu tujuan RUU EBET ini adalah TKDN dan juga menghadirkan EBET seperti baterai.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto juga meminta Pemerintah melibatkan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dalam pembahasan RUU ini. Sebab, dukungan dari kementerian ini dalam EBET belum terlalu kuat.

Apalagi ada dualisme BRIN dan Kemdikbudristek dalam hal riset dan inovasi yang dikhawatirkan menjadi kendala memperkuat EBET melalui berbagai riset.

"Kami tidak ingin Kemdikbudristek basa-basi saja ikut membahas RUU ini. Kami ingin ini dibahas betul-betul di sini kalau bisa juga dengan mengikutsertakan BRIN," ujarnya.

Politisi Fraksi PKS ini menuturkan, selama ini pihaknya kesulitan untuk meningkatkan kemampuan riset dan inovasi di dalam negeri lantaran Kemdikbudristek bukanlah mitra kerja Komisi VII DPR.

"Kalau BRIN di sini bisa komprehensif ketika berbicara riset dan inovasi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman juga berharap ada revisi Surpres dengan memasukkan Kemenperin dalam pembahasan RUU EBET ini.

"Saya kira menjadi penting kehadiran Kemenperin ini untuk ikut masuk dalam Surpres. Artinya ini menjadi salah satu saran karena terkait hilirisasi dari EBET dalam hal ini Kemenperin," ujarnya.

Atas usulan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya menyadari dan sepakat dengan perlunya kehadiran Kemenperin dalam RUU ini. Sebab, banyak hal terkait dengan industri di mana Kemenperin sebagai pendukung pemanfaat energi barunya.

Menteri ESDM berjanji akan melakukan konsultasi ke Sekretaris Negara (Setneg) atas usulan revisi Surpres ini. "Kita akan konsultasi dengan Setneg dalam waktu secepatnya," tambah dia.

RUU EBET ini, lanjutnya, diperlukan untuk menciptakan iklim pengembangan EBET yang berkelanjutan dan berkeadilan. Juga untuk target pencapaian *Nationally Determined Contribution* dan *Net Zero Emission* serta mendukung pembangunan *green industry*.

Diharapkan, setelah terbitnya RUU EBET ini dapat memberi kepastian dan landasan hukum bagi pengembangan EBET dan pelaksanaan program pendukungnya.

"Mengoptimalkan sumber daya, memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor EBET," ujarnya. ■ KAL